

## Efektivitas Koalisi Gemuk Parpol Pilkada DKI Jakarta 2012

**Achmad Syarkowi Jazuli\***

### Abstrak

*Pertarungan Jokowi-Ahok dan figur incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu dianggap sebagai toggak penting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kekalahan koalisi gemuk Fauzi Bowo menjadi bukti bahwa oligarki partai dapat dikalahkan sosok Joko Widodo. Dengan menggunakan teori Arendt Ljiphart, dapat diketahui bahwa koalisi gemuk yang dibentuk Fauzi Bowo tidak sekuat koalisi yang diciptakan Joko Widodo. Mesin Partai dalam koalisi gemuk tidak berjalan karena sikap pragmatis partai yang berakibat keputusan elit partai tidak diikuti kader dan simpatisan. Hasilnya Fauzi Bowo dengan koalisi gemuknya gagal meraup suara diputar kedua. Kekalahan Fauzi Bowo dapat dilihat bahwa pemilih di Jakarta semakin cerdas karena pudarnya kekuatan partai dalam mempengaruhi pemilih dalam pilkada.*

**Kata kunci :** Pilkada, koalisi gemuk, partai politik, oligarki partai

### Abstract

*The previous election race between Jokowi-Ahok and the incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi on Jakarta governor election on 2012 has made significant turning point on Indonesia's local election. The failure of the big coalition of Fauzi Bowo has proven that party's oligarchy system may not work against the the figure of Joko Widodo. Applying Arendt Ljiphard , it is shown that big coalition established by Fauzi Bowo were not as strong as Joko Widodo's. The political machines within the coalition has not worked as expected due to pragmatic behaviour shown by party elites which in turn has not managed to draw many support among the party loyal followers. The result were the the lost of Fauzi Bowo to win voters on the second round of the election. His lost has also demostrated that the voters in Jakarta are becoming more critical and not easily influenced by political parties's campaign*

**Kata kunci :** Local Election, Party Coalition, Political Parties

---

**\*Korespondensi:**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145  
Email:

## Pengantar

-koalisi besar dari partai pengusung Foke-Nara tidak akan berjalan efektif mesin partainya. Pasalnya, startegi dan langkah-langkah ini sudah diuji coba oleh Foke pada Pilgub DKI tahun 2007.1

-Merdeka, 7 September 2012)

-Panitia Bersama (panbers) koalisi sejumlah partai politik untuk mengusung pasangan calon tertentu, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI, diperkirakan tidak akan segemuk panbers pada Pilkada 2008. Saat itu, 20 partai politik bergabung dalam panbers yang mengusung pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Koalisi sebesar itu sulit terjadi lagi pada Pemilukada 2012."

(Kompas.com, 22 Maret 2011)

Kekalahan Fauzi Bowo dan Nachrowi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta merupakan pelajaran berharga bagi partai politik berparas pragmatis. Koalisi yang menjadi strategi ampuh untuk menarik suara rakyat kini dapat dikalahkan oleh sosok figur pasangan Joko Widodo dan Basuki. Dimana pasangan tersebut hanya didukung oleh dua partai yaitu PDIP dan Gerindra bahkan mampu unggul jauh di putaran pertama pilkada DKI melawan lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur baik dari partai maupun yang berbasis independen.

Segmentasi peserta yang bertarung dalam pilkada DKI putaran pertama tahun 2012 dapat dibagi dalam dua jenis, pertama calon pasangan independen yaitu Faisal Batubara -Biem Triani Benjamin dan pasangan Hendarji Soepandji – Ahmad Riza Patria. Yang kedua pasangan yang berkoalisi dengan partai politik diantaranya Hidayat Nur Wahid - Didik J. Rachbini dari PKS, Alex Noerdin dan Nono Sampono yang didukung oleh beberapa partai politik (Golkar, PPP, PDS, PP, PKPB, PKDI, Republikan, PPIB, Partai Buruh, PPNUI, PNI Marhaenisme) dan Fauzi Bowo – Nachrowi yang didukung oleh Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, PMB, dan PKNU. Dari faktor kekuatan sosok figur, pasangan Independen mungkin lebih banyak menarik perhatian *voters* khususnya pasangan Faisal – Biem yang mengambil jalan inovatif seperti penggunaan *social media* dengan segmentasi anak muda. Sedangkan orientasi pasangan yang berkoalisi cenderung hanya berfokus pada kemampuan partai sebagai mesin pendulang suara.

Jika dianalisa berdasarkan faktor kekuatan figur dan gabungan koalisi partai politik, Jokowi - Ahok dinilai sukses menggabungkan kedua faktor tersebut dalam pilkada DKI. Maka tak heran jika di putaran kedua Fauzi Bowo yang didukung koalisi

gemuk partai politik (ditambah Golkar, PPP dan PKS) tidak bisa mengalahkan koalisi yang dibentuk Jokowi dengan rakyat. Hal tersebut juga menampikkan fakta bahwa lima tahun lalu, koalisi serupa efektif membuat Fauzi Bowo menjadi orang nomor satu di Jakarta. Maka dari itu tulisan ini mempertanyakan bagaimana Efektifitas koalisi gemuk partai politik yang mendukung Foke-Nara pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012? Padahal pada tahun 2007, koalisi parpol pada pilkada DKI sukses besar dalam menarik suara secara signifikan.

### **Konsep Koalisi Partai Politik**

Koalisi dalam pengertian Heywood sebagaimana dikutip Sigit Pamungkas dalam buku *-Partai Politik : Teori dan Praktek di Indonesia* adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah. Pendapat ini menunjukkan bahwa ada kesamaan tujuan yang dilakukan dengan cara yang sama pula, seperti partai politik yang cenderung bekerja sesuai pendekatan *program oriented* (Dhakidae, 2009).

Disisi lain makna terdalam koalisi adalah tuntutan mutlak mengembangkan eksekutif yang kuat (*strong, powerful*), mandiri (*autonomous*), dan tahan lama (*durable*) (Cipto, 2000). Pandangan ini mengedepankan etika dari para partai yang sedang berkoalisi, dalam jalur dan lorong komitmen etis (Dhakidae, 2009) sehingga dapat memunculkan kerjasama antar peserta koalisi berdasarkan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Sehingga nilai-nilai tersebut berlangsung secara etis dan fair, yang pada akhirnya menciptakan koalisi yang sehat dan bertahan lama. Berbeda dengan koalisi yang didasarkan pada eksistensi semata menuju pemilu selanjutnya.

Dalam buku *-Partai, Kekuasaan dan Militerisme* oleh Bambang Cipto menjelaskan ada beberapa teori koalisi menurut Arend Ljiphart diantaranya :

-Ada lima teori utama yang dapat dibagi dari teori koalisi. diantaranya yakni, (1) *minimal winning coalition*, (2) *minimum size coalition*, (3) *bargaining proposition*, (4) *minimal range coalitions*, (5) *minimal connected winning coalitions*.

Dari penjelasan beberapa teori diatas dapat dilihat pola-pola koalisi yang mungkin dilakukan berdasarkan ilustrasi dibawah ini :

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa huruf A hingga E merupakan partai politik yang disusun berdasarkan kecenderungan ideologi. Sedangkan angka didalam kurung merupakan prosentase jumlah kursi di parlemen. Representasi ideologi partai yang paling berhaluan kiri (A) dan yang paling berhaluan kanan (E) tidak mungkin bergabung dalam sebuah koalisi, sedangkan partai tengah (C) masih bisa berkoalisi dengan partai yang paling kiri maupun yang paling kanan. Jika melihat implementasi dari kelima teori koalisi menurut Arend Ljiphart diatas, berdasarkan spektrum ideologi yang sudah digambarkan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Teori *Minimal Winning Coalition* mempunyai prinsip dasar yaitu maksimalisasi kekuasaan atau sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu.
2. Teori *Minimum Size Coalitions* adalah kecenderungan partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.
3. Teori *Bargaining Proposition* mempunyai prinsip dasar koalisi ini adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit dan menjamin bahwa koalisi akan berjalan lancar tanpa gangguan.
4. Teori *Minimal Range Coalitions* berdasarkan prinsip bahwa kedekatan dan kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet.
5. Teori *Minimal Connected Winning Coalitions* mempunyai pandangan bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksananya. Sehingga mereka berkoalisi bukan hanya merebut kekuasaan tapi juga mempertimbangkan kebijaksanaan partai yang cenderung sama.

Bukan hanya dari kelima teori ini, beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisa Efektivitas koalisi partai politik dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2012 adalah perlunya melihat arena dalam koalisi partai politik. Menurut Heywood dalam Sigit Pamungkas (2011:78) menyebutkan empat arena koalisi parpol diantaranya (Pamungkas, 2009) :

-Pertama, koalisi elektoral, yaitu aliansi melalui mana partai politik setuju untuk tidak bersaing melawan satu dengan yang lainnya, dengan pandangan untuk memaksimalkan representasi bersama mereka. Kedua, koalisi legislatif, yaitu kesepakatan antara dua atau lebih partai mendukung sebuah undang-undang atau sebuah program tertentu. Ketiga, koalisi pemerintahan, adalah kesepakatan formal diantara dua atau lebih partai yang melibatkan distribusi lintas partai portofolio menteri. Terakhir, koalisi besar atau pemerintahan nasional, yaitu meliputi seluruh parta-partai utama, tetapi

mereka biasanya dibentuk hanya ketika ada krisis nasional atau bahaya ekonomi.

Dari beberapa penjelasan teori koalisi berdasarkan spektrum ideologi dan arena dalam berkoalisi, dapat dilihat bahwa koalisi yang dibangun oleh Fauzi Bowo pada pilkada DKI Jakarta lebih bersifat *Minimal Connected Winning Coalitions* dalam arena koalisi elektoral. Sifat *hybrid* ini memungkinkan adanya kekuatan koalisi yang besar, karena ada beberapa tanggapan bahwa kedekatan ideologis antar partai yang berkoalisi lebih bersifat pragmatis daripada bersifat komitmen etis.

### **Strategi Koalisi Fauzi Bowo dan Nachrowi : Romantisme Pilkada 2007**

Ada istilah menarik yang diungkapkan oleh Gun Gun (Kompas, 2012) dalam menganalisis strategi yang diusung oleh pasangan Fauzi – Nachrowi yaitu strategi *-blocking party*. *Blocking party* sebenarnya merupakan pendekatan lain dari teori koalisi menurut Arend Ljiphart yaitu *Minimal Connected Winning Coalitions*. Tapi dalam arena elektoral, *blocking party* sesungguhnya merupakan sebuah strategi kemenangan absolut, guna mencegah lawan membangun koalisi yang lebih besar dari kumpulan partai-partai pendulang suara, dan ini terbukti pada pilkada DKI 2007 dimana koalisi gemuk dibentuk pihak Fauzi Bowo dan Prijanto.

Koalisi gemuk yang menjadi andalan Fauzi Bowo pada pilkada DKI Jakarta 2012 pada akhirnya tidak berjalan efektif sebagaimana yang terjadi pada pilkada lima tahun lalu, ketika Fauzi Bowo melawan Adang Daradjatun dalam perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Strategi *-blocking party* yang dilakukan oleh Fauzi Bowo terhadap Adang Daradjatun terbukti sangat efektif, ini ditandai dengan dukungan tak kurang dari 20 partai politik bersatu dalam koalisi kemenangan Fauzi Bowo dan Prijanto yang diusung Golkar. Sedangkan Adang dan Dani hanya di dukung satu partai yaitu PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

### Peta Koalisi Pilkada DKI 2007

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Partai Pendukung
Fauzi Bowo dan Prijanto	Golkar	Golkar, PPP, Partai Demokrat, PDIP, PDS, PBR, PBB, PPNUI, PPDK, PKPB, PPDI, PBSO, PPIB, Partai Merdeka, PKB, PAN, PPD, Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor, PKPI
Adang Daradjatun dan Dani Anwar	PKS	PKS

Sumber : kpu.d.go.id

Hasilnya Fauzi Bowo dan Prijanto menjadi pemenang pilkada DKI Jakarta periode 2007-2012 dengan uraian tabel dibawah :

No.	Pasangan Calon	Jakarta Pusat	Jakarta Timur	Jakarta Selatan	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Kep. Seribu	Jumlah
1	Adang-Dani	183.679 (43,96%)	465.750 (43,22%)	341.667 (42,60%)	304.983 (39,06%)	235.616 (39,11%)	3.860 (33,11%)	<b>1.535.555</b> <b>(42,13%)</b>
2	Fauzo-Prijanto	234.144 (56,04%)	611.788 (56,78%)	460.380 (57,40%)	475.894 (60,94%)	319.506 (57,56%)	7.799 (66,89%)	<b>2.109.511</b> <b>(57,87%)</b>

Hasil perolehan suara pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2007(sumber : kpu.go.id)

Dari hasil tersebut pasangan Fauzi-Prijanto sah menjadi pemenang dan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Hal tersebut tak lepas dari strategi *blocking party* yang direncanakan sebelumnya oleh Fauzi Bowo. Tapi yang menjadi catatan penting bahwa PKS dinilai masih sangat mampu memperoleh suara dari para kader maupun simpatisannya, presentase 42,13% dengan estimasi jumlah suara sebanyak 1.535.555 suara, menjadi bukti bahwa sebagai mesin pendulang suara dan sebagai jawara pada pemilu tahun 2004 menunjukkan kekuatannya menarik simpati rakyat (Majalah Prima, 2009).

Walaupun PKS mampu mendapat suara setengah dari gabungan 20 partai koalisi, ada satu faktor kunci yang membuat pasangan Adang-Dani kalah dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2007 melawan strategi *blocking party* Fauzi Bowo, yaitu kurangnya kekuatan sosok dan figur yang kuat tertanam dalam benak mayoritas rakyat Jakarta. Sebagai Wakapolri Adang dinilai belum memiliki positioning yang cukup kuat, kalah dari sosok figur Fauzi Bowo yang sudah dikenal banyak warga Jakarta, hal tersebut seperti yang diungkapkan dalam artikel berjudul *-Bang Adang Kalah Popularitas Dalam Pilkada Jakarta* (Fahriza dkk, 2012).

-Faktor orang lama itu, salah satu menjadi faktor penghalang Adang untuk meraup suara yang lebih banyak lagi, pasalnya Bang Foke menjabat sebagai wakil gubernur (wagub) hingga memudahkan untuk mengawali pengenalan namanya sebagai cagub yang ditambah lagi wajahnya terpampang di mana-mana salah satunya di papan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta.

Presentase 57.8% suara yang diraih Fauzi Bowo menjadi bukti kemenangan koalisi gemuk. Tapi estimasi suara tersebut berkurang, karena pada awalnya gabungan dari 20 partai itu menghasilkan suara sebanyak 75.8% selama Pemilu Legislatif 2004. Hal tersebut juga ditambah dengan faktor kekuatan yang dimiliki oleh Fauzi Bowo karena statusnya sebagai orang dalam birokrasi Jakarta, hingga mesin pendulang suara bukan hanya dari partai tapi juga dari unit birokrasi terendah di Jakarta, seperti dalam kutipan artikel dengan judul yang sama (Rohmah, 2012):

-Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indra J Piliang, mengatakan, alasan Fauzi Bowo bisa memenangi pilkada itu, tidak terlepas dari bisa menggerakkan birokrasi untuk mendukungnya baik di tingkat atas sampai struktural terkecil, yakni, RW. Mesin birokrasi ini lebih efektif dibandingkan dengan partai politik.

Dari penggalan kutipan diatas, jelas bahwa kemenangan Fauzi Bowo dalam pilkada DKI Jakarta 2007 merupakan gabungan dari kekuatan koalisi dan sosok figur yang dilegitimasi rakyat. Tapi ketika melihat pilkada DKI Jakarta 2012, ada sebuah fenomena penting yang menunjukkan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung koalisi partai kecil mampu mengalahkan calon dari koalisi gemuk dari partai-partai besar yang cenderung bercorak oligarki.

### **Koalisi Gemuk Partai Politik : Sebuah Pelajaran**

Seperti yang telah diprediksi oleh beberapa pengamat politik, kemunculan koalisi gemuk partai politik dalam arena pilkada DKI Jakarta tahun 2012 merupakan sebuah strategi lama yang ditempuh pasangan *incumbent* (Fauzi Bowo) seperti yang dilakukan dalam pilkada periode sebelumnya. Kemenangan atas Adang Daradjatun

memberikan rasa optimis bagi beberapa anggota koalisi. Fenomena ini semakin menjadi sorotan manakala manuver PKS yang sebelumnya mengusung Hidayat Nur Wahid pada putaran pertama, akhirnya masuk dalam koalisi gemuk Fauzi Bowo.

Hal tersebut mungkin dapat menjadi jaminan bagi Fauzi Bowo untuk memenangkan pilkada DKI periode 2012-2017. Yang menjadi perhatian adalah gerakan partai pengusung calon gubernur dan wakil gubernur yang kalah pada putaran pertama memberikan dukungan pada Fauzi Bowo dengan masuk dalam koalisi gemuk tersebut. Dari fakta tersebut benarlah pendapat Gun-Gun yang mengatakan bahwa :

-Kemungkinan besar koalisi itu bersifat pragmatisme transaksional. Kondisi itu sama seperti Pilkada 2007 di mana Foke yang berpasangan dengan Prijanto menerapkan strategi penguasaan parpol. Kini, kata dia, Foke-Nara secara intensif bernegosiasi guna membangun koalisi besar (Merdeka.com, 2012)

Seperti yang terlihat dalam kekuatan koalisi yang dibentuk beberapa calon gubernur dan wakil gubernur di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2012 pada tabel dibawah :

#### **Peta Koalisi Putaran Pertama Pilkada DKI 2012**

<b>No.</b>	<b>PasanganCalon</b>	<b>PartaiPengusung</b>	<b>PartaiPendukung</b>
1	Fauzi Bowo dan Nachrowi	Demokrat	Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, PMB, dan PKNU
2	Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama	PDIP	PDIP Gerindra
3	Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini	PKS	PKS
4	Faisal Batubara dan Biem Triani Benjamin	Independen	Tidak ada
5	Alex Noerdin dan Nono Sampono	Golkar	Golkar, PPP, PDS, PP, PKPB, PKDI, RepublikaN, PPIB, PartaiBuruh, PPNUI, PNI Marhaenisme
6	Hendardji Soepandji dan Ahmad Riza Patria	Independen	Tidak ada

Sumber : kpud.go.id

Tapi apa daya, koalisi gemuk awal Fauzi Bowo tersungkur di putaran pertama. Kemenangan Jokowi dan Basuki menjadi pukulan berat bagi koalisi besar partai politik yang berusaha memenangkan Fauzi Bowo dan Nachrowi. Hasil rekapitulasi perhitungan suara menunjukkan bahwa Joko Widodo mendapatkan 1.847.157 suara dengan presentase 42,60%. Sedangkan Fauzi Bowo-Nara hanya mendapat 1.476.648 suara dengan presentasi 34,05%. Sisanya, seperti Hidayat-Didik mendapat 508.113 suara (11,72%), Faisal-Biem mendapat 215.935 suara (4,98%), Alex-Nono mendapat 202.643 suara (4,67%) dan Hendarji-Riza hanya mendapat 85.990 suara (1,98%) (KPU, 2012). Selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Nama Pasangan	Jumlah Total suara	Presentase
1	Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama	1.847.157	42.60%
2	Fauzi Bowo dan Nachrowi	1.476.648	34.05 %
3	Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbani	508.113	11,72%
4	Faisal Batubara dan Biem Triani Benjamin	215.935	4,98%
5	Alex Noerdin dan Nono Sampono	202.643	4,67%
6	Hendarji Soepandji dan Ahmad Riza Patria	85.990	1,98%
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>4.429.533</b>	
	<b>Jumlah Golput</b>	<b>2.555.207</b>	
	<b>Jumlah Daftar Pemilih Tetap</b>	<b>6.962.348</b>	

Sumber : kpu.go.id

Di putaran kedua, pertarungan semakin sengit karena hanya tinggal dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersisa, Jokowi-Ahok dan Foke-Nara. Yang disayangkan adalah strategi koalisi Fauzi Bowo tetap bercorak *Minimal Connected Winning Coalitions*, hal tersebut dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, adanya pengakuan dari PKS untuk mengintegrasikan tujuan dan program yang di emban oleh kebijakan partai dalam kasus jangka menengah untuk program di Jakarta. Program yang dicanangkan oleh PKS ternyata lebih cenderung sesuai dengan program yang dijalankan calon *incumbent*, hingga akhirnya PKS masuk dalam koalisi yang dibentuk Fauzi Bowo. Seperti yang terlihat dalam perubahan peta koalisi di putaran kedua pada tabel dibawah :

**Peta Koalisi Putaran kedua Pilkada DKI 2012**

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Partai Pendukung</b>
Fauzi Bowo dan Nachrowi	Partai Demokrat	Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, PMB, PKNU serta tiga partai yang baru bergabung di putaran kedua yaitu Golkar, PPP dan PKS
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama	PDIP	PDIP dan Gerindra

Sumber : kpud.go.id

Kedua, lingkungan arena elektoral pilkada DKI Jakarta berdekatan dengan pemilu presiden 2014, sehingga ada pertarungan eksistensi di daerah Ibukota untuk mendapat basis dukungan yang besar. Oleh karena itu terbentuklah koalisi yang akan dijadikan ajang transaksi politik maupun *sharing power*, seperti yang selalu menjadi fenomena belakangan ini (Dhakidae, 2009).

Tapi pada kenyataannya strategi koalisi gemuk ini lagi-lagi gagal menghadang kekuatan sosok dan figur Jokowi. Kekalahan Fauzi Bowo dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Nama Pasangan	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Kep. Seribu	Jumlah
1	Foke-Nara	249.427	300.188	476.472	611.366	474.298	8.794	2.120.815
2	Jokowi-Ahok	256.529	432.714	507.257	695.220	577.232	3.178	2.472.130

Hasil rekapitulasi Pilkada DKI Jakarta 2012 (sumber : kpud.go.id)

Kemenangan Jokowi di seluruh kecamatan minus Kepulauan Seribu menunjukkan adanya dukungan yang merata dan luas. Hal ini juga menunjukkan rapor merah koalisi gemuk Fauzi Bowo selain diputaran pertama. Tidak efektifnya koalisi tersebut merupakan buah dari rasa optimistis yang tinggi, mengenang pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Fauzi Bowo lupa bahwa salah satu faktor penting pemenangnya adalah kekuatan sosok dan figur. *Positioning* yang diambil Fauzi Bowo tenggelam oleh

*branding* sosok Jokowi yang sudah dikenal sebagai Walikota Solo yang *legitimate*. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Gun Gun:

-Pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta ini, kelompok pemilih yang belum berpartisipasi dalam putaran pertama akan lebih berpotensi memilih Jokowi. Alasannya, karena tentu pemilih jenis ini, kalau pun memilih lebih cenderung memilih icon perubahan dibanding status quo. Sekarang ini yang lebih banyak menjadi pertimbangan pemilih adalah sosok dengan *track-record*, bukan lagi partai terlebih jika partai tersebut elitis dan oligarkis. (Merdeka.com, 2012)

Pendapat tersebut pada akhirnya juga menjadikan Fauzi Bowo kehilangan pamornya. Disisi lain, faktor penentu kekalahan Fauzi Bowo adalah tidak jalannya mesin partai sebagai pendulang suara, salah satunya adalah PKS yang gagal menarik seluruh simpatisan maupun kadernya memilih Fauzi Bowo. Manuver PKS yang awalnya menyerang kubu Fauzi Bowo dan kemudian malah mendukungnya di putaran kedua, dinilai tidak konsisten dan membuat citra yang buruk di mata pendukungnya. Sebenarnya jika dukungan PKS dapat terserap seluruhnya oleh Fauzi Bowo besar kemungkinan calon *incumbent* tersebut dapat memenangi Pilkada DKI Jakarta periode 2012-2017, seperti yang diungkapkan oleh Saman Al Hakim :

-PKS memang menjadi salah satu -partai harapan yang bisa menjadi penentu kemenangan. Pada Pilkada putaran pertama, pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini yang didukung PKS memperoleh suara yang cukup signifikan (11.72% atau 508.113 suara). Bila konstituen pendukung HNW-DJR beralih ke Fauzi-Nara diputaran kedua ini – menyusul deklarasi dukungan yang ditandatangani kemarin — maka tentu saja akan memberikan efek luar biasa bagi perolehan suara Fauzi-Nara. Belum lagi dukungan dari sejumlah partai politik lain seperti PPP yang sudah secara resmi berkoalisi dengan pasangan ini (Kompasiana, 2012).

Tapi kenyataannya, suara kader dan simpatisan PKS tidak maksimal karena pengaruh rasionalitas pemilih yang tidak mengikuti keputusan elit partai PKS. Munculnya *swing voters*, salah satunya disebabkan oleh kejenuhan sistem koalisi transaksional yang dianut partai politik secara umum, hingga menimbulkan stigma anti oligarki partai dikalangan luas. Seperti yang dijelaskan oleh Dodi Ambardi dalam wawancara Media Indonesia 16 September 2012 :

-Meskipun sejumlah partai pendukung telah mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan tertentu, tetapi ternyata suara masyarakat di lapangan tak sama dengan pandangan petinggi partai di jajaran elite. Partai politik bukanlah penentu pilihan masyarakat. Kata dia, hal tersebut tergantung pada

disiplin pemilih. Partai itu bukan kata akhir. Meski elite satu suara, tapi itu tergantung disiplin pemilih. Setiap partai bervariasi, contohnya Partai Demokrat sebagai partai pengusung pasangan calon Foke-Nara. Harusnya jelas ketika partai mendukung kubu tertentu semua kadernya melakukan hal yang sama, tetapi yang terlihat baru 63% yang mendukung Foke-Nara dan 31% mendukung Jokowi-Ahok (Media Indonesia, 2012).

Dari hal tersebut jelaslah bahwa koalisi gemuk tidak memberikan hasil maksimal sebagaimana telah dipraktekan dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Bahkan dalam dua putaran, koalisi gemuk ini tidak pernah bisa melampaui perolehan suara milik Jokowi. Ini juga memperlihatkan dengan koalisi kecil dan stabil serta *positioning* figur dan sosok Jokowi yang kokoh, mampu menarik perhatian rakyat secara luas. Mesin partai dalam koalisi guna mendulang suara sekarang menjadi macet, dikarenakan sosok figur yang tidak lebih kuat dari kekuatan koalisi yang besar dan pada akhirnya tidak bisa mendapatkan dukungan rakyat secara maksimal.

### **Kesimpulan : Tiga Catatan Penting**

Ada tiga catatan penting yang bisa diambil dari fenomena kalahnya koalisi gemuk Fauzi Bowo versus kekuatan figur dan tokoh Jokowi. Pertama, meningkatnya jumlah pemilih di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 3.737.059 suara dari 5.725.767 daftar pemilih tetap (DPT). Bandingkan dengan pilkada DKI Jakarta dimana dari 6.996.951 DPT menggunakan hak pilihnya dengan jumlah 4.592.945 suara. Jelas ada peningkatan suara dan partisipasi rakyat Jakarta dari tahun 2007 hingga tahun 2012 (KPUD, 2012).

Kedua, rasionalitas pemilih yang semakin cerdas. Kegagalan partai-partai besar dalam menarik suara partisipan, simpatisan, maupun kadernya menjadi catatan penting bagi eksistensi partai politik. Golkar, PPP, Demokrat dan PKS yang masuk dalam koalisi gemuk Fauzi Bowo ternyata tak mampu mengalahkan suara yang dikumpulkan oleh Jokowi yang hanya didukung oleh dua partai, yaitu PDIP dan Gerindra. Ini menjadi pembuktian bahwa rakyat semakin cerdas memilih, dan corak oligarki partai yang tertanam dalam koalisi besar sudah tak lagi populer di Jakarta.

Ketiga, hadirnya kekuatan politik baru di pemilu DKI Jakarta yaitu gabungan koalisi kecil partai ditambah kekuatan sosok dan figur yang populer. Hal itu menunjuk pada Jokowi yang berhasil menanamkan *positioning* kepada publik, seperti kinerjanya yang merakyat, keberhasilan merelokasi PKL tanpa menciptakan resistensi, dan prestasinya sebagai salah satu walikota terbaik di dunia menjadi alat kampanye paling unggul dibanding hanya menggunakan mesin pendulang suara seperti partai politik. Kombinasi ini pada akhirnya juga mengurangi tingkat golput di putaran kedua pilkada

DKI Jakarta 2012. Ini terbukti dari total 6.996.951 DPT, tercatat 4.592.945 suara dinyatakan sah, dengan total golput 2.349.657. Bandingkan dengan putaran pertama, dimana golput mencapai 2.555.207 (KPUD, 2012). Oleh karena itu kekuatan figur Jokowi setidaknya mampu menurunkan presentase golput walaupun tidak signifikan.

Dari ketiga pelajaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hegemoni partai politik berbasis koalisi gemuk dalam arena elektoral berbasis daerah menuju paradigma yang semakin cerdas. Pemilih dan rakyat pada dasarnya mampu memilih bukan berdasarkan aliran elit partai, tapi lebih kepada rasionalitas dan prinsip yang dipegangnya. Pelajaran di pilkada DKI Jakarta 2012 bisa menjadi sebuah catatan penting dimana fenomena ini berdekatan dengan pemilu presiden, sebuah arena elektoral yang luas dan berskala nasional. Akankah koalisi dan oligarki partai politik masih menjadi strategi ampuh untuk mendulang suara rakyat, atau partai politik nantinya mulai menggunakan kekuatan figur yang kuat untuk mengurangi *bargaining* politik yang kental dalam koalisi yang bersifat transaksional. Tapi yang pasti, rakyat sebagai pemilih punya nalar dan prinsip yang sulit untuk diprediksi, semua tergantung dari partai politik sebagai penentu dalam pendewasaan demokrasi suatu negara\*\*\*.

### **Daftar Pustaka**

- Cipto, Bambang. (2000). *Partai, Kekuasaan, dan Militerisme*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Partai Politik : Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism
- Daniel Dhakidae, -Partai Politik di Persimpangan Jalan dalam Majalah Prisma -Senjakala Kapitalisme dan Krisis Demokrasi. Vol.28, Juni 2009. LP3ES : Jakarta

### **Artikel :**

- Artikel berjudul -Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012-2017, sumber : <http://remunerasipns.com.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2012.
- Artikel berjudul -Bang Adang Kalah Popularitas Dalam Pilkada Jakarta, oleh Riza Fahriza, Virna Puspa S, Heppy Ratna Sari, sumber : [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) diakses pada tanggal 10 Oktober 2012.
- Artikel berjudul -Oligarki Politik Tumbang di Pilkada DKI, oleh Alfyyatur Rohmah, sumber : [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada tanggal 10 Oktober 2012.
- Artikel dalam [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses pada tanggal 10 Oktober 2012
- Artikel berjudul -Koalisi Strategis PKS dan Fauzi Bowo-Nara oleh Saman Al Hakim, sumber : [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses pada tanggal 9 Oktober 2012
- Artikel berjudul -Keputusan Elite Partai bukan Penentu di Pilgub DKI oleh R.R Putri Werdiningsih, sumber : [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) diakses pada tanggal 10 Oktober 2012